

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara kelembagaan, madrasah telah mengalami perkembangan dalam bidang pendidikan di Indonesia. Bersama-sama pondok pesantren dan sekolah, madrasah yang secara khusus untuk menyambut lembaga pendidikan keislaman, telah memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap upaya mencerdaskan anak bangsa. Madrasah dibangun merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan. Karena Madrasah adalah lembaga pendidikan keislaman, maka banyak madrasah yang didirikan oleh pemuka agama Islam yang berafiliasi pada organisasi sosial keagamaan seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan al-Irsyad. Data EMIS Departemen Agama RI Menunjukkan bahwa madrasah yang dikelola swasta mencapai berjumlah 91,07 % sedangkan sisanya sebanyak 8,03 %, dikelola pemerintah.

Pengakuan terhadap kontribusi madrasah bagi pendidikan nasional terlihat dalam SKB tiga menteri, yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 dan No. 36 Tahun 1975. SKB tiga menteri tersebut merupakan upaya untuk menyetarakan madrasah dengan sekolah umum melalui peningkatan mutu transmisi pengetahuan umum dan keterampilan pada lembaga pendidikan yang secara administratif berada dibawah koordinasi Departemen Agama RI. Selanjutnya, pemerintah menetapkan pengakuan terhadap madrasah yang dituangkan dalam undang-undang. Dalam UU

SPN No. 2 Tahun 1989 yang kemudian ditindaklanjuti dengan PP No. 28/1990 tentang Pendidikan Dasar dan PP. No 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, menyebutkan bahwa madrasah diberikan predikat sekolah umum berciri khas Islam. Dengan demikian, madrasah ibtdaiyah setara dengan SD, MTs setara dengan SLTP dan MA setara dengan SMU. Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa istilah “ciri khas Islam” tidak lagi disebutkan, sebab dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa madrasah sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar dan menengah tanpa menyebutkan ciri khas keagamaan.

Pengakuan semacam ini tentu saja menimbulkan konsekuensi, yaitu bahwa madrasah harus mampu menghasilkan lulusan yang kualitasnya sama dengan lulusan sekolah. Namun dalam kenyataannya, peningkatan mutu lulusan madrasah seringkali terhalang oleh kendala yang cukup serius yaitu jumlah dan kualitas guru yang kurang memadai. Berdasarkan pengamatan dan informasi yang diperoleh *stakeholder* madrasah, ternyata mutu pembelajaran di madrasah belum mencapai tingkat yang memuaskan. Hal itu disebabkan karena kompetensi mengajar guru yang belum maksimal. Ada beberapa indikator yang menggambarkan kondisi demikian, yaitu:

1. Prestasi belajar siswa madrasah belum optimal. Hal ini terlihat dari nilai UAN mereka yang sangat rendah untuk pelajaran umum dan prestasi akademik lainnya.
2. Guru kurang siap dalam melaksanakan aktivitas pembelajaran. Hal ini tergambar dari penguasaan substansi materi, kemampuan dalam

menggunakan metode mengajar, kemampuan dalam menyusun alat evaluasi, dan kemampuan menangani masalah belajar siswa yang sangat rendah. Sebab, banyak guru madrasah yang mengajar bidang pelajaran tertentu yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan.

Ferry Sudjana menyebutkan,¹ bahwa guru memiliki kedudukan sentral karena perannya sangat menentukan dalam proses pembelajaran. Meski proses pendidikan melibatkan berbagai unsur antara lain kurikulum, sarana-prasarana, penilaian dan lain-lain, namun guru tetap memiliki peran strategis dalam menggerakkan semua unsur tersebut. Lebih lanjut, Usman menyebutkan bahwa guru berperan dalam menciptakan serangkaian perilaku yang saling berkaitan dengan perubahan perilaku dan perkembangan siswa.²

Peran guru dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sebagai pelaksana pembelajaran di kelas dan individu yang bertugas mendidik serta membantu siswa mencapai tingkat perkembangan tertentu. Guru merupakan mediator yang bertugas melakukan proses transformasi pengetahuan, nilai dan keterampilan kepada peserta didik. Guru bertanggungjawab dalam mengelola, mengarahkan dan menciptakan suasana yang dapat mendorong siswa melaksanakan kegiatan belajar. Karena itu, tujuan pendidikan akan tercapai melalui kemampuan dan kecakapan guru dalam melaksanakan pengajaran. Sehingga wajar bila seorang

¹Ferry Sudjana, *Peningkatan Mutu Madrasah*, (Yogyakarta: Gerbang Ilmu, 1995), h. 5.

²Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994), h. 4.

ahli pendidikan dasar, Joan Dean menyebutkan,³ bahwa guru sebagai *the most important and expensive resources in any class room*.

Saat ini, di tengah masyarakat berkembang tuntutan terhadap profesionalisasi dalam setiap bidang pekerjaan yang tergambar pada sertifikasi dan akreditasi yang harus dimiliki tenaga kerja profesional. Tuntutan tersebut direspon pemerintah dengan menetapkan standarisasi kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam UU No 14. Tahun 2005 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.⁴ Selain itu, penerapan pendidikan berbasis kompetensi memberikan implikasi terhadap pengelola pendidikan terutama guru yang dituntut memiliki kompetensi yang memadai.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi guru madrasah, Departemen Agama telah melakukan berbagai pendidikan dan penelitian, baik yang dikelola sendiri melalui Pusdiklat maupun dengan kerjasama dengan IAIN/STAIN atau perguruan tinggi lainnya. Bentuk pendidikan yang dilakukan secara kolaborasi dengan IAIN/STAIN atau PT lainnya dalam bentuk penyetaraan D-2 untuk guru RA dan MI, penyelenggaraan Akta IV untuk guru MTs dan MA. Selain itu diklat jangka pendek maupun jangka panjang dilakukan pula melalui proyek pengembangan madrasah.

³Joan Dean, *Introduction to the Basic Introduction*, (London: Educational Chemistry, 1983), h. 71.

⁴Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *Tentang Guru dan Dosen*, (Jakarta: Ciputat Press, 2006), h. 10.

Jika dicermati, ternyata program yang telah dilaksanakan tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas madrasah. Hal itu dapat dilihat prestasi akademik lulusan madrasah yang selalu lebih rendah daripada sekolah. Perubahan lebih banyak terjadi pada bidang administrasi, yaitu, semakin kecil rasio atau jumlah guru yang berlatar belakang pendidikan lebih rendah dari yang dipersyaratkan.

Salah satu contoh adanya pelatihan kependidikan yang telah diikuti oleh para guru Madrasah Aliyah Negeri Maluku Kabupaten Pulau Pisau yaitu dengan diselenggarakannya diklat kependidikan yang diselenggarakan dilingkungan Departemen Agama seperti Pusdiklat/Balai Diklat, Proyek DMAP dalam jangka waktu 4 tahun terakhir (tahun 2001-2004).

Berdasarkan fenomena di atas, dipandang perlu melakukan studi tentang kompetensi guru MAN Maluku ditinjau dari program pendidikan dan pelatihan pendidikan yang telah diikuti oleh para guru tersebut.

Dari hal tersebut di atas, maka peneliti menjadikan masalah kompetensi guru MAN Maluku ditinjau dari program pendidikan dan pelatihan pendidikan sebagai objek penelitian. Yang difokuskan untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh tentang relevansi pendidikan dan pelatihan kependidikan guru yang dilakukan oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan kebutuhan mengajar guru di kompetensi guru MAN Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam laporan Tesis yang berjudul “RELEVANSI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROFESIONALITAS GURU (Studi dengan Guru MAN Maluku

Kabupaten Pulang Pisau)”, diharapkan muncul konsep baru untuk pengembangan pradigma.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok yang dibahas dalam penelitian ini adalah latar belakang pendidikan dan pelatihan guru yang dilaksanakan di MAN Maluku Kabupaten Pulang Pisau dan relevansinya dengan kebutuhan mengajar.

Agar pembahasan dapat dilakukan secara mendalam dan terarah, maka masalah pokok tersebut dirumuskan dengan meneliti tiga masalah berikut:

1. Bagaimana jenis dan kegiatan program dan pelatihan kependidikan profesionalitas guru?
2. Bagaimana diskripsi kinerja guru MAN Maluku yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kependidikan profesionalitas guru?
3. Bagaimana relevansi pelatihan kependidikan profesionalitas guru dan kinerja guru MAN Maluku?

Penelitian ini mencoba menjawab tiga pertanyaan tersebut. Penyelesaian terhadap pertanyaan kedua merupakan syarat bagi upaya menjawab bagian pertama, yang merupakan masalah pokok penelitian ini. Kemudian untuk menyempurnakannya dengan jawaban bagian ketiga. Studi ini dibatasi pada guru yang telah mengikuti diklat kependidikan yang diselenggarakan di lingkungan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti Pusdiklat/Balai Diklat. Proyek DMAP dalam jangka waktu (tahun 2001-2004).

C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul di atas, penulis merasa perlu memberikan penegasan definisi tersebut:

1. Pendidikan dan Pelatihan Guru

Pendidikan di Indonesia seringkali berhadapan dengan berbagai problematika yang tidak ringan. Sebagai sebuah sistem, pendidikan mengandung berbagai komponen yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan.

Komponen pendidikan tersebut meliputi landasan, tujuan, kurikulum, kompetensi dan profesionalisme guru, pola hubungan guru dan murid, metodologi pembelajaran, sarana prasarana, evaluasi, pembiayaan dan lain sebagainya. Berbagai komponen yang terdapat dalam pendidikan ini seringkali berjalan apa adanya, alami dan tradisional, tanpa konsep manajerial yang lengkap dan jelas. Akibat dari keadaan demikian, maka mutu pendidikan seringkali menunjukkan keadaan yang kurang mengembirakan.

Guru merupakan jabatan atau pekerjaan profesi yang memerlukan keahlian khusus, bakat serta minat yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang diluar bidang kependidikan dan tidak semua orang yang telah menyelesaikan pendidikan guru atau sekolah guru dengan sendirinya telah dapat suka terhadap pekerjaannya sebagai guru. Pekerjaan guru sebagai profesi meliputi “mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup, mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melatih menumbuhkan mengembangkan keterampilan.”⁵ Sebagai guru profesional

⁵Moh. Uzer Usman, *op. cit.*, h. 4.

harus menguasai tentang ilmu pendidikan dan ilmu-ilmu pengetahuan lain yang perlu dibina dan dikembangkan melalui pendidikan tertentu atau pendidikan pra jabatan. Apalagi saat ini yang dinamakan abad informasi yang diawali dengan adanya penemuan-penemuan baru di bidang ilmu teknologi yang semakin canggih, yang menuntut penyesuaian kemampuan guru sebagai pelaksana pendidikan.

Guru sebagai manusia tentu saja memiliki kemampuan untuk menjadikan dirinya sebagai orang tua kedua yang mampu menarik perhatian dan simpati siswa. Guru yang baik harus disenangi muridnya. Perhatian dan rasa simpati siswa terhadap gurunya dalam proses belajar mengajar sebagai motivasi bagi siswa dalam belajar dan proses menyampaikan atau transformasi ilmu yang diberikan akan dengan mudah dapat diterima dan dipahami siswa. Untuk itu, guru harus memiliki sifat-sifat yang mendukung penampilannya, yaitu “Periang, ramah, memiliki kematangan emosional, jujur, tenang, pribadi yang mantap dan kemampuan beradaptasi”.⁶

Guru sebagai masyarakat adalah seorang yang dianggap masyarakat sebagai komponen yang strategis dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa dimulai dari masyarakat lingkungan sekolah, karena keberadaan guru merupakan sarana bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan untuk dapat beradaptasi. “Guru tidak hanya diperlukan oleh murid dalam ruang kelas, tapi juga diperlukan oleh masyarakat lingkungannya dalam menyelesaikan aneka ragam permasalahan yang dihadapi masyarakat”.⁷

⁶Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi*, (Jakarta: Reneka Cipta, 1993), h. 258.

⁷Moh. Uzer Usman, *op. cit.*, h. 6.

Balakangan ini program pelatihan guru menjadi pusat perhatian pelbagai kalangan. Gordon dan Browne, menyatakan bahwa guru harus mendapat pelatihan tentang teori pembelajaran dan perkembangan.⁸ Pelatihan ini membantu guru membuat kebijakan yang tepat mengenai pendekatan belajar siswa dan perkembangan anak. Pelatihan ini juga mempengaruhi kebijakan dalam menyusun kurikulum.

Dengan pengembangan profesi tersebut, guru Madrasah Aliyah yang telah mengikuti diklat kependidikan yang diselenggarakan di lingkungan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan seperti Pusdiklat/Balai Diklat, Proyek DMAP dalam jangka waktu 4 tahun terakhir (tahun 2001-2004) akan lebih mengenal adanya keragaman kultural, akademik dan manusia. Tanpa latar belakang professional yang berhubungan dengan pengembangan profesi, guru akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memahami bagaimana siswa belajar dan bagaimana cara mengajar mereka. Program pelatihan ini memang secara umum dikembangkan untuk digunakan semua guru terlepas dari rencana kurikulum yang sedang mereka susun.

2. Madrasah Aliyah Negeri Maluku

Madrasah dapat diartikan sebagai sekolah atau perguruan, biasanya yang berdasarkan agama Islam.⁹ Adapun Van Berchem menggambarkan madrasah sebagai lembaga pendidikan pada umumnya dan sedikit mengalami perubahan

⁸Gordon, A.M. dan Browne, K.W., *Beginnings and Beyond: Foundations in Early Childhood Education*, (New York: Delmar, 2000), h. 123.

⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), h. 541.

dan mengambil bentuk sebagai sebuah bangunan yang didirikan sesuai dengan tujuan pendiriannya.¹⁰

Berdasarkan dengan sejarah kelahiran madrasah dapat dikemukakan bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan yang lahir dari dan untuk masyarakat. Artinya, lembaga madrasah tidak dapat digantikan dengan lembaga lainnya, karena madrasah memiliki visi, misi dan karakteristik yang sangat khas di dalam masyarakat dan bangsa Indonesia. Madrasah sangat diperlukan keberadaannya sebagai tempat murid-murid menerima ilmu pengetahuan agama secara teratur dan sistematis.¹¹

Dalam tulisan ini akan dipaparkan, dianalisa dan dikritisi bagaimana Madrasah Aliyah Negeri Maluku dalam memanfaatkan pelatihan dan pendidikan guru dalam relevansinya terhadap kebutuhan mengajar. Madrasah Aliyah Negeri Maluku dimaksudkan di sini adalah MAN yang berlokasi di Jalan Maluku RT VI Desa Maluku Baru Kecamatan Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Pengelolanya adalah Lembaga Pendidikan MAN Maluku Kabupaten Pulau.

3. Relevansi terhadap Profesionalitas Guru

Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan relevansi adalah tingkat kesesuaian antara diklat kependidikan yang diikuti guru dengan kebutuhan akan kompetensi yang harus mereka kuasai dalam kegiatan mengajar yang mencakup:

¹⁰George Makdisi, *The Rise of Colleges, Institution of Learning in Islam and The West*, (Naiderland: Edinburgh University Press, 1981), h. 297.

¹¹Ali al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 30.

- a. Relevansi materi diklat dengan kebutuhan yang terkait dengan aktivitas pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan, penilaian, komunikasi edukasional, dan manajemen kelas.
- b. Relevansi materi dengan jabatan atau karir guru.
- c. Relevansi pendekatan / metode pembelajaran yang digunakan dengan kondisi peserta.
- d. Relevansi waktu penyelenggaraan dengan kelancaran pelaksanaan tugas guru di madrasah.
- e. Relevansi lingkungan belajar dengan tujuan diklat yang ditetapkan.

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah meneliti sejauh mana Pendidikan dan Pelatihan Profesionalisme Guru di Madrasah Aliyah Negeri Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Dan untuk mengetahui tentang relevansinya terhadap kebutuhan mengajar meliputi penguasaan bahan, kesadaran waktu, penggunaan metode, pengelolaan program belajar mengajar, pengelolaan interaksi belajar, dan pengembangan keterampilan pribadi pada saat proses belajar mengajar sedang berlangsung baik dari segi teori maupun praktek.

D. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan penulis memilih judul ini adalah:

1. Mengingat betapa pentingnya pendidikan dan pelatihan profesionalisme guru di Madrasah Aliyah. Maka, Diklat merupakan hal yang sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme guru terhadap kebutuhan mengajar, baik melalui teori maupun praktek..

2. Menurut sepengetahuan penulis masalah yang diangkat dalam penelitian ini belum pernah ada yang meneliti terutama pada Madrasah Aliyah Negeri Maluku Kabupaten Pulau Pisau.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang relevansi pendidikan dan pelatihan kependidikan guru dengan kebutuhan mengajar guru MAN Maluku dengan rincian sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan jenis dan kegiatan program pelatihan yang pernah diikuti guru MAN Maluku dan jawaban yang objektif terhadap relevansi pendidikan dan pelatihan kependidikan guru di MAN Maluku.
2. Mendiskripsikan kinerja guru MAN Maluku yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan profesionalitas guru.
3. Mengetahui relevansi pendidikan dan pelatihan kependidikan guru dengan kebutuhan mengajar guru dan hasil kualitas pendidikan yang lebih baik di MAN Maluku Kabupaten Pulau Pisau.

Dengan tujuan yang dipaparkan di atas tentu akan memberikan nilai signifikansi yang cukup apresiatif terhadap kualitas pendidikan yang lebih baik di MAN Maluku Kabupaten Pulau Pisau. Alasannya adalah penelitian ini akan melakukan penggalian dan sekaligus memperkenalkan kualitas pendidikan MAN Maluku Kabupaten Pulau Pisau sehingga bisa terus dikenang dan dipelajari oleh generasi seterusnya, tidak hanya itu penelitian ini juga akan berusaha “mengajak”

untuk melakukan pembaharuan pemikiran. Singkatnya manfaat ini bisa diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi lembaga pendidikan umumnya dalam mengembangkan kualitas pendidikan khususnya, sehingga output yang dihasilkan dapat diterima di masyarakat dan dunia kerja.
2. Bagi pihak kampus, penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan pertimbangan untuk memperbaiki berbagai kelemahan dan sebaliknya mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki.
3. Bagi pemerintah khususnya Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan sekaligus implementasinya.
4. Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu masukan/informasi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.

F. Kerangka Teoritik

Menurut Bernandian dan Russel,¹² pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah setiap usaha memperbaiki kinerja individu pada satu pekerjaan tertentu yang menjadi tanggungjawabnya atau berkaitan dengan pekerjaannya. Handoyo Notoatmojo,¹³ mengemukakan bahwa diklat merupakan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Menurut Tulus,¹⁴ diklat

¹²Bernandian dan Russel, *Mastery Learning*, (Paris: UNESCO, 1993), h. 297.

¹³Handoyo Notoatmojo, *Sekali Lagi Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah Kita*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 25.

¹⁴Tulus, *Wajah Sekolah dan Madrasah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1993), h. 88.

merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan keinginan organisasi. Sedangkan menurut Siswanto,¹⁵ diklat perlu diadakan untuk mendapatkan nilai tambah karyawan yang berkaitan dengan peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan, sikap, dan keterampilan karyawan yang bersangkutan. Menurut Martha Tilaar,¹⁶ pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bentuk pekerjaan yang semakin standar tinggi yang sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kebutuhan masyarakat, menjadikan pelatihan merupakan suatu hal yang mutlak untuk diselenggarakan.

Menurut Hadi Handoko,¹⁷ tujuan utama diklat mencakup dua hal, yaitu: (1) menutup “gap” antara kecakapan atau kemampuan karyawan dengan permintaan jabatan; dan (2) program-program diklat diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan dalam mencapai sasaran-sasaran kerja yang telah diharapkan.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, tampak bahwa diklat guru merupakan salah satu kunci dalam manajemen tenaga kependidikan, sekaligus merupakan salah satu tugas dan tanggungjawab yang tidak dapat dilaksanakan secara sembarangan. Artinya, agar efektivitas diklat dapat terjamin, diklat perlu ditangani secara serius, baik yang terkait dengan sarana maupun prasarannya.

¹⁵Siswanto, *Sistem Peningkatan Mutu Pelajaran di Kelas*, (Bandung: Pustaka, 1989), h. 139.

¹⁶Martha Tilaar, *Memajukan Sekolah Memajukan Guru*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 152.

¹⁷Hadi Handoko, *Menengok Kembali Pendidikan Kita*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1993), h. 103.

Selanjutnya, diklat kependidikan yang dimaksud dalam pelatihan ini adalah pelatihan guru terhadap kegiatan pengembangan dan peningkatan pengetahuan, sikap serta keterampilan yang pernah diikuti guru yang diselenggarakan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup kelembagaan, proses rekrutmen peserta, kurikulum dan pembelajaran, kompetensi dosen/widyaiswara, dan sarana/prasarana.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah memahami pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik dan sistematika penulisan.
- BAB II : Relevansi pendidikan dan pelatihan kependidikan guru dengan kebutuhan mengajar guru, yang berisikan: Tinjauan tentang apa pelatihan dan pendidikan, Tinjauan tentang pendidikan, tinjauan tentang mutu pendidikan, dan kajian pustaka.
- BAB III : Metode penelitian yang menguraikan tentang subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, kerangka dasar penelitian, tehnik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

- BAB IV : Laporan hasil penelitian yang berisikan tentang latar belakang obyek penelitian, penyajian data dan analisa data.
- BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.